



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2020 Nomor 1777);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana berapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor).
25. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.559.279.559.643,00 (Dua Triliun Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 315.849.210.525,00 (Tiga ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.960.899.220,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.922.702.017,00 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.579.190.491,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.386.418.797,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.960.899.220,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp. 29.079.725.733,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp. 23.035.653.453,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);

- c. Pajak Hiburan Rp. 7.790.513.000,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp. 2.991.494.562,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 28.810.159.918,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp. 2.113.305.788,00 (Dua Miliar Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp. 16.475.373.200,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Wallet Rp. 14.804.315.763,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 1.750.278.803,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 24.110.079.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Seratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar);

Pasal 5

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.922.702.017,00 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 20.621.120.117,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp. 3.509.385.400,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp. 2.792.196.500,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pasal 6

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.579.190.491,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Pasal 7

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 97.386.418.797,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Pendapatan Bunga Rp. 1.900.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- c. Pendapatan BLUD Rp. 94.236.418.797,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);

Pasal 8

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.207.958.386.864,00 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.074.461.316.000,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.893.735.568.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.725.748.000,00 (Seratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.497.070.864,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.471.962.254,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh

Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah), bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.169.962.254,00 (Tiga puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.538.492.429.747,00 (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.922.645.716.447,00 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.166.981.291.341,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 643.644.562.656,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 95.544.997.846,00 (Sembilan Puluh Lima

Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.166.981.291.341,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 743.585.197.058,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.439.013.191,00 (Seratus Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 206.015.771.849,00 (Dua Ratus Enam Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.648.292.317,00 (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 155.523.620,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.000.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.818.392.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 52.407.101.306,00 (Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 643.644.562.656,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 308.366.262.074,00 (Tiga Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 191.207.444.001,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Satu Rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.888.657.919,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.831.476.636,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.481.272.312,00 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 46.975.838.000,00 (Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 37.893.611.714,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)

Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.544.997.846,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.476.375.550,00,- (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.476.574.000,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 897.088.296,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 49.694.960.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), diarahkan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0.00,- (Nol Rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua

Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang diarahkan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah),

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Suplus sebesar Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah),
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp. 20.787.129.896,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah),

Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi *) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

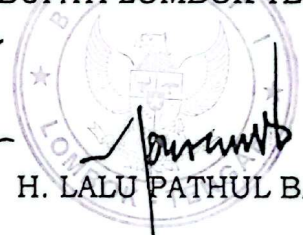
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 27

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 31 Desember 2023
BUPATI LOMBOK TENGAH, *4*

2

H. LALU PATHUL BAHRI
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
40



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 315.849.210.525,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 178.960.899.220,00 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 29.079.725.733,00 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 29.079.725.733,00 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 29.079.725.733,00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 24.035.653.453,00 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 24.035.653.453,00 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 24.035.653.453,00 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 7.790.513.000,00 |
| 4.1.01.08.02 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 3.000.000,00 |
| 4.1.01.08.02.0001 | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 3.000.000,00 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 7.341.109.108,00 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 7.341.109.108,00 |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 173.000.000,00 |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 173.000.000,00 |
| 4.1.01.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 273.403.892,00 |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga | 273.403.892,00 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 2.991.494.562,00 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.991.494.562,00 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.991.494.562,00 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 28.810.159.918,00 |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 28.810.159.918,00 |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 28.810.159.918,00 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 2.113.305.788,00 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 2.113.305.788,00 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 2.113.305.788,00 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 16.475.373.200,00 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 16.475.373.200,00 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 16.475.373.200,00 |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 14.804.315.763,00 |
| 4.1.01.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 14.804.315.763,00 |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 14.804.315.763,00 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.750.278.803,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.750.278.803,00 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1.750.278.803,00 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 24.110.079.000,00 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 24.110.079.000,00 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 24.110.079.000,00 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 27.000.000.000,00 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 27.000.000.000,00 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 27.000.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 26.922.702.017,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 20.621.120.117,00 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 12.523.503.792,00 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 12.523.503.792,00 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 394.074.000,00 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 394.074.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 292.200.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 292.200.000,00 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6.802.442.325,00 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 276.051.000,00 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 6.526.391.325,00 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 533.900.000,00 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 533.900.000,00 |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 75.000.000,00 |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 75.000.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.509.385.400,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.423.581.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 2.074.600.000,00 |
| 4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | 348.981.000,00 |
| 4.1.02.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 497.424.000,00 |
| 4.1.02.02.02.0001 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 80.400.000,00 |
| 4.1.02.02.02.0002 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 417.024.000,00 |
| 4.1.02.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 67.000.000,00 |
| 4.1.02.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 67.000.000,00 |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 64.240.000,00 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 64.240.000,00 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 87.600.000,00 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 87.600.000,00 |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 369.540.400,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 101.000.000,00 |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 183.040.400,00 |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 85.500.000,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 2.792.196.500,00 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 3.200.000,00 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 3.200.000,00 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.241.112.500,00 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.241.112.500,00 |
| 4.1.02.03.08 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 547.884.000,00 |
| 4.1.02.03.08.0001 | Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 547.884.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.579.190.491,00 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 12.579.190.491,00 |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 12.579.190.491,00 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 12.579.190.491,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 97.386.418.797,00 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 1.250.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.250.000.000,00 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.250.000.000,00 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 1.900.000.000,00 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.900.000.000,00 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1.900.000.000,00 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 94.236.418.797,00 |
| 4.1.04.16.02 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 93.611.018.797,00 |
| 4.1.04.16.02.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 93.611.018.797,00 |
| 4.1.04.16.04 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 575.400.000,00 |
| 4.1.04.16.04.0001 | Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 575.400.000,00 |
| 4.1.04.16.06 | Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah | 50.000.000,00 |
| 4.1.04.16.06.0001 | Pendapatan BLUD dari Jasa Giro | 50.000.000,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.207.958.386.864,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.074.461.316.000,00 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.893.735.568.000,00 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 94.007.060.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 1.052.743.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 7.599.532.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 72.015.101.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 11.925.439.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 37.685.000,00 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.376.560.000,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.220.699.479.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 980.773.396.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0002 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan | 2.400.000.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0004 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | 28.956.609.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0005 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan | 108.198.288.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0006 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan | 94.850.184.000,00 |
| 4.2.01.01.02.0007 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum | 5.521.002.000,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 206.665.442.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 3.683.557.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 29.003.917.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 28.932.887.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 3.419.333.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 2.121.964.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 29.940.716.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 2.066.400.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 5.507.103.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 13.943.433.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 13.256.386.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 10.018.592.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 9.411.685.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 2.359.130.000,00 |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 53.000.339.000,00 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 372.363.587.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 116.103.800.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 3.605.000.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 158.242.873.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 5.962.909.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 25.864.800.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 7.121.000.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 11.678.958.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 503.831.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 25.703.335.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 9.655.535.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 612.881.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan | 1.449.970.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal | 417.035.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 342.000.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 3.126.900.000,00 |
| 4.2.01.01.04.0024 | DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | 1.972.760.000,00 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 180.725.748.000,00 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 180.725.748.000,00 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 180.725.748.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 133.497.070.864,00 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 129.410.909.764,00 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 129.410.909.764,00 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 21.947.811.378,00 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 21.796.611.913,00 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 35.154.268.357,00 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 90.507.979,00 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 50.421.710.137,00 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 4.086.161.100,00 |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 4.086.161.100,00 |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 4.086.161.100,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 35.471.962.254,00 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 302.000.000,00 |
| 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 0,00 |
| 4.3.01.05 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 302.000.000,00 |
| 4.3.01.05.01 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 302.000.000,00 |
| 4.3.01.05.01.0001 | Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis | 302.000.000,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 35.169.962.254,00 |
| 4.3.03.02 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 35.169.962.254,00 |
| 4.3.03.02.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 35.169.962.254,00 |
| 4.3.03.02.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 35.169.962.254,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 2.559.279.559.643,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.918.210.851.843,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.166.981.291.341,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 743.585.197.058,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 558.112.976.782,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 409.541.802.242,00 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 148.571.174.540,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 53.408.500.180,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 38.506.765.127,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 14.901.735.053,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 6.571.393.151,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 6.571.393.151,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 32.999.054.396,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 32.999.054.396,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 15.317.224.587,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 6.189.039.715,00 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 9.128.184.872,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 35.574.824.879,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 22.788.481.917,00 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 12.786.342.962,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 617.597.447,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 617.597.447,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 22.625.711,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 19.458.937,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 3.166.774,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | 36.357.203.156,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 29.863.963.556,00 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 6.493.239.600,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.151.144.056,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 831.524.070,00 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 319.619.986,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 3.452.652.713,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 2.493.837.821,00 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 958.814.892,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 108.439.013.191,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 108.439.013.191,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 108.439.013.191,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 206.015.771.849,00 |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 8.948.044.962,00 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 1.453.986.287,00 |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 1.201.782.673,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 389.525.650,00 |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 149.574.728,00 |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 1.440.507.997,00 |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 105.665.289,00 |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 823.768.660,00 |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 740.215.788,00 |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 87.513.940,00 |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 1.205.503.950,00 |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 1.350.000.000,00 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 1.368.185.131,00 |
| 5.1.01.03.02.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 626.175.190,00 |
| 5.1.01.03.02.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 19.703.700,00 |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 14.610.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 326.319.566,00 |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 26.695.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 3.750.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 20.310.030,00 |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 134.981.600,00 |
| 5.1.01.03.02.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 24.871.200,00 |
| 5.1.01.03.02.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan | 3.350.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0020 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 3.212.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0022 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 6.120.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0024 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah | 18.477.020,00 |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 160.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0031 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung | 112.055.625,00 |
| 5.1.01.03.02.0032 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) | 27.394.200,00 |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 158.242.873.000,00 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 158.242.873.000,00 |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 5.962.909.000,00 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 5.962.909.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 30.523.873.756,00 |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 30.523.873.756,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 965.086.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 946.596.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 18.490.000,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 4.800.000,00 |
| 5.1.01.03.08.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 1.200.000,00 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 3.600.000,00 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 25.648.292.317,00 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.483.289.721,00 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.483.289.721,00 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 121.323.510,00 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 121.323.510,00 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 139.915.440,00 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 139.915.440,00 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 95.508.000,00 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 95.508.000,00 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.623.297.116,00 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.623.297.116,00 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 143.967.600,00 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 143.967.600,00 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 6.300.000.000,00 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 6.300.000.000,00 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.575.000.000,00 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.575.000.000,00 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 227.311.266,00 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 227.311.266,00 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 6.556.679.664,00 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 24.436.692,00 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 2.292.192,00 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 6.876.576,00 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 6.523.074.204,00 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.905.000.000,00 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 6.905.000.000,00 |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 477.000.000,00 |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 477.000.000,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 155.523.620,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.390.251,00 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.390.251,00 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.749.000,00 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 7.749.000,00 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 78.925.000,00 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 78.925.000,00 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.165.355,00 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.165.355,00 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 340.557,00 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 340.557,00 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 497,00 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 497,00 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 5.503.680,00 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 5.503.680,00 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.960,00 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.960,00 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 912.000.000,00 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 312.000.000,00 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 312.000.000,00 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 600.000.000,00 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 600.000.000,00 |
| 5.1.01.88 | Belanja Pegawai BOS | 29.818.392.000,00 |
| 5.1.01.88.88 | Belanja Pegawai BOS | 29.818.392.000,00 |
| 5.1.01.88.88.8888 | Belanja Pegawai BOS | 29.818.392.000,00 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 52.407.101.306,00 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 52.407.101.306,00 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 52.407.101.306,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 643.644.562.656,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 308.366.262.074,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 304.445.718.480,00 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1.668.776.511,00 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 1.666.541.723,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 12.830.444.699,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 67.289.574,00 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 275.903.795,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 130.627.610,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 8.700.981.995,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 66.895.502,00 |
| 5.1.02.01.01.0014 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar | 7.210.688,00 |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 799.218.215,00 |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 7.357.915,00 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 46.130.599,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3.997.533.847,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 56.544.351,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.727.419.559,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 149.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.001.561.214,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.160.936.847,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4.327.383.767,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 151.762.196,00 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 356.368.786,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 354.727.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 102.744.913,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 18.828.637.641,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 6.929.125.423,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 189.810.119.601,00 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.112.760.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 2.602.135.721,00 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 217.702.939,00 |
| 5.1.02.01.01.0049 | Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya | 12.753.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 32.492.213.950,00 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 9.280.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 8.638.031.420,00 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 59.482.080,00 |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | 339.864.090,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 22.054.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 10.598.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0068 | Belanja Pakaian Siaga | 208.791.612,00 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | 16.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 159.970.740,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 54.097.718,00 |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 268.237.839,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 3.920.543.594,00 |
| 5.1.02.01.04.0207 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah | 3.427.087.594,00 |
| 5.1.02.01.04.0545 | Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | 493.456.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 191.207.444.001,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 91.574.674.456,00 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 72.900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 3.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.292.805.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 5.376.019.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 174.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 3.041.840.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 4.480.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian | 17.661.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 310.400.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 748.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 3.166.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 1.933.090.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 858.398.400,00 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 708.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 18.750.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 1.136.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 28.725.634.300,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 2.100.175.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 2.368.636.810,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 360.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 72.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 241.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 764.080.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias | 55.027.490,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 747.705.801,00 |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 374.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 25.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3.720.999.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 162.364.700,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 2.769.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 1.296.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 626.712.652,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 17.097.674.248,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 480.940.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 4.308.503.401,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 84.260.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 843.213.154,00 |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 2.130.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 18.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0077 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 1.633.008.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 79.939.952.245,00 |
| 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.024.879.360,00 |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI | 5.153.642.218,00 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 48.666.479.400,00 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 21.614.658.315,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.044.327.852,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 435.965.100,00 |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 6.000.000,00 |
| 5.1.02.02.03.0030 | Belanja Sewa Tanah untuk Latihan | 6.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 3.018.055.005,00 |
| 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator | 360.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 687.095.660,00 |
| 5.1.02.02.04.0112 | Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya | 13.795.400,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.957.163.945,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2.125.607.860,00 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 1.671.298.800,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 374.309.060,00 |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 80.000.000,00 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 46.931.378,00 |
| 5.1.02.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 46.931.378,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 2.724.313.461,00 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 2.143.831.579,00 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 500.941.882,00 |
| 5.1.02.02.08.0028 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | 79.540.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 118.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 118.000.000,00 |
| 5.1.02.02.11 | Belanja Beasiswa Pendidikan ASN | 25.290.000,00 |
| 5.1.02.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 25.290.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 11.628.619.596,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 1.973.344.596,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 9.024.295.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 630.980.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 4.888.657.919,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.853.445.100,00 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 55.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0006 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment | 27.500.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 191.400.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.767.400.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 8.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 6.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0049 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 20.240.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 100.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 39.810.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 112.750.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 455.345.100,00 |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 20.000.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0492 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | 50.000.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.230.439.110,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 1.018.705.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 23.900.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | 187.834.110,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 804.773.709,00 |
| 5.1.02.03.04.0026 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi | 554.400.000,00 |
| 5.1.02.03.04.0079 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 133.373.709,00 |
| 5.1.02.03.04.0083 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya | 117.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 28.831.476.636,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 28.831.476.636,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 16.117.234.050,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12.714.242.586,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 25.481.272.312,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 25.420.222.312,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 2.408.054.240,00 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 22.903.500.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0006 | Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian | 108.668.072,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 61.050.000,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 61.050.000,00 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 46.975.838.000,00 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 46.975.838.000,00 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 46.975.838.000,00 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 37.893.611.714,00 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 37.893.611.714,00 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 37.893.611.714,00 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 11.500.000.000,00 |
| 5.1.03.01 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | 11.500.000.000,00 |
| 5.1.03.01.02 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 11.500.000.000,00 |
| 5.1.03.01.02.0001 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang | 11.500.000.000,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 95.544.997.846,00 |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 28.476.375.550,00 |
| 5.1.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 28.476.375.550,00 |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 28.476.375.550,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 16.476.574.000,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 7.551.574.000,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 7.551.574.000,00 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 8.250.000.000,00 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 8.250.000.000,00 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 675.000.000,00 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 675.000.000,00 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 897.088.296,00 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 897.088.296,00 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 897.088.296,00 |
| 5.1.05.08 | Belanja Hibah Dana BOSP | 49.694.960.000,00 |
| 5.1.05.08.01 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 16.709.160.000,00 |
| 5.1.05.08.01.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOS | 16.709.160.000,00 |
| 5.1.05.08.02 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 25.864.800.000,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.05.08.02.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD | 25.864.800.000,00 |
| 5.1.05.08.03 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 7.121.000.000,00 |
| 5.1.05.08.03.0001 | Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan | 7.121.000.000,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 540.000.000,00 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 540.000.000,00 |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 540.000.000,00 |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 540.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 275.377.358.980,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.513.489.997,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 5.973.757.147,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 5.973.757.147,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 17.703.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0016 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 5.956.054.147,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 9.961.066.643,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 9.961.066.643,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 849.296.149,00 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.702.715.004,00 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 104.406.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 7.304.649.490,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 40.464.000,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 40.464.000,00 |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | 40.464.000,00 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 22.986.998,00 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 22.986.998,00 |
| 5.2.02.04.01.0009 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 932.898,00 |
| 5.2.02.04.01.0010 | Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya | 22.054.100,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.202.950.718,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 927.521.253,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 927.521.253,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 5.268.754.465,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 4.077.033.339,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 277.892.765,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 370.569.201,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 543.259.160,00 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 6.675.000,00 |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 6.675.000,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 931.289.852,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 900.941.852,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 431.038.441,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 290.463.212,00 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 179.440.199,00 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 30.348.000,00 |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 30.348.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 14.964.097.131,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 11.461.471.902,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 2.673.826.652,00 |
| 5.2.02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak | 2.700.000.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0015 | Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic | 4.022.471.080,00 |
| 5.2.02.07.01.0024 | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | 2.026.936.122,00 |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 38.238.048,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 3.502.625.229,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 3.502.625.229,00 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 14.993.859.349,00 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 590.203.410,00 |
| 5.2.02.08.01.0064 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya | 590.203.410,00 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 12.953.473.021,00 |
| 5.2.02.08.03.0016 | Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya | 12.953.473.021,00 |
| 5.2.02.08.07 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 1.450.182.918,00 |
| 5.2.02.08.07.0001 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | 1.450.182.918,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 6.520.912.775,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 5.279.787.132,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 284.450.852,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 4.995.336.280,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.241.125.643,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 127.654.320,00 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 36.595.200,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 1.076.876.123,00 |
| 5.2.02.11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 35.553.870,00 |
| 5.2.02.11.02 | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | 35.553.870,00 |
| 5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric | 35.553.870,00 |
| 5.2.02.17 | Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi | 1.138.500.000,00 |
| 5.2.02.17.01 | Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi | 1.138.500.000,00 |
| 5.2.02.17.01.0026 | Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya | 1.138.500.000,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 102.289.088,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 102.289.088,00 |
| 5.2.02.18.01.0001 | Belanja Modal Rambu Bersuar | 97.113.600,00 |
| 5.2.02.18.01.0002 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 5.175.488,00 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 15.041.446.000,00 |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 15.041.446.000,00 |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 15.041.446.000,00 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2.584.316.426,00 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2.584.316.426,00 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2.584.316.426,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 149.628.741.603,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 149.144.471.185,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 149.144.471.185,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 34.182.862.493,00 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 17.458.352.258,00 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 83.873.066.645,00 |
| 5.2.03.01.01.0016 | Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan | 4.134.092.813,00 |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan | 33.055.446,00 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 6.391.769.600,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 9.913.680,00 |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 3.061.358.250,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 369.270.418,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 369.270.418,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 369.270.418,00 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 115.000.000,00 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 115.000.000,00 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 115.000.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 35.564.895.400,00 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 22.649.433.000,00 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 15.374.433.000,00 |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 15.374.433.000,00 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 7.275.000.000,00 |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 7.275.000.000,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 12.751.300.000,00 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 12.751.300.000,00 |
| 5.2.04.02.01.0008 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya | 12.751.300.000,00 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 164.162.400,00 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 153.540.600,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 153.540.600,00 |
| 5.2.04.03.05 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 10.621.800,00 |
| 5.2.04.03.05.0012 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya | 10.621.800,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 11.660.231.980,00 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 120.000.000,00 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 120.000.000,00 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 120.000.000,00 |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 376.267.980,00 |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 376.267.980,00 |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | 376.267.980,00 |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 11.163.964.000,00 |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 11.163.964.000,00 |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 11.163.964.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 10.000.000,00 |
| 5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 10.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 10.000.000,00 |
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 10.000.000,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.000.000.000,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 339.904.218.924,00 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 20.588.360.124,00 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 17.896.089.922,00 |
| 5.4.01.01.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 17.896.089.922,00 |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 17.896.089.922,00 |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 2.692.270.202,00 |
| 5.4.01.02.01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 2.692.270.202,00 |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 2.692.270.202,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 319.315.858.800,00 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 319.315.858.800,00 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 312.109.858.800,00 |
| 5.4.02.05.01.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa | 312.109.858.800,00 |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 7.206.000.000,00 |
| 5.4.02.05.02.0003 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa | 7.206.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja | 2.538.492.429.747,00 |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Total Surplus/(Defisit) | 20.787.129.896,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 20.787.129.896,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 20.787.129.896,00 |
| 6.2.03.01 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat | 20.787.129.896,00 |
| 6.2.03.01.01 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah | 20.787.129.896,00 |
| 6.2.03.01.01.0001 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah | 20.787.129.896,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 20.787.129.896,00 |
| | Pembayaan Netto | -20.787.129.896,00 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 |

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2023

Bupati

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP. M.AP